

**PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH APARAT POLRI
(TINJAUAN KRIMINOLOGIS)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

ANDI ANUGRAH YUDHA PUTRA

NIM. 10500109012

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara ANDI ANUGRAH YUDHA PUTRA NIM: 10500109012 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi maka skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri (Tinjauan Kriminologis)*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Makassar, Desember 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kasjim, SH., M.TH.i.
NIP. 19600817 199203 1 001

Rahman Syamsuddin, SH., MH.
NIP. 19821207 200901 1 010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2013

Penyusun,

ANDI ANUGRAH YUDHA PUTRA

NIM: 10500109018

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri (Tinjauan Kriminologis)**” yang disusun oleh saudara ANDI ANUGRAH YUDHA PUTRA, NIM: 10500109012, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 27 Desember 2013, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 2014

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, SH, M, Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi, SH., MH.	(.....)
Munaqisy II	: Drs. M. Tahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Kasjim, SH., M.TH.i.	(.....)
Pembimbing II	: Rahman Syamsuddin, SH.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.
NIP. 19570414 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh diberkahi oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri (Tinjauan Kriminologis)”**.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada ayahanda H. Andi Baso dan Ibunda tercinta Hj. Andi Hasnah atas seluruh cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tak henti mengalir dalam sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S selaku rektor UIN Alauddin Makassar, yang memberi pencerahan dan menjadi contoh pemimpin yang baik;
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan para Wakil Dekan yang selalu menuangkan waktunya untuk member bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, serta Staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu dan memberikan petunjuk terkait yang berkaitan pengurusan akademik sehingga penulis lancar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Yth. Bapak Dr. H. Kasjim, SH., M.TH.i selaku Pembimbing I dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH., selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan waktu luangnya dan memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Aipda. Resky Yospiyah, SH. Bagian Subbagkum Polrestabes Makassar membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh keluarga besar saya yang elah memberikan doa, motivasi dan selalu mendukung saya.
7. Kepada sahabat-sahabat penulis, Arfah, SH., Anugrah Imam Santoso, Muhammad Mahathir, SH., Muhammad Hamsah, dan untuk semua sahabatku khususnya seluruh keluarga besar jurusan Ilmu Hukum angkatan 2009, terima kasih sudah menemani selama kurang lebih 4 tahun, semoga kita bisa berkumpul kembali.
8. Kepada Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) yang telah membantu penulis dalam belajar tentang HUKUM.
9. Bapak-bapak Polisi dan Pegawai Polrestabes Makassar yang menyempatkan banyak waktu, tempat, dan bantuannya selama penelitian saya.

10. Dan terakhir kepada diri penulis sendiri yang sampai saat ini masih tegar, kuat dan semangat dalam menghadapi proses penyelesaian karya ilmiah yang merupakan tugas akhir dari strata S1.

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas penulisan karya ilmiah ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
Terima kasih...

Penulis,

Andi Anugrah Yudha Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pengertian Operasional	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian.....	14
1. Kriminologi	14
2. Kepolisian Republik Indonesia	19
3. Senjata Api	22
B. Jenis – Jenis Kriminologi	25
C. Kode Etik Kepolisian	39
D. Ketentuan Perundang-undangan Tentang Senjata Api.....	41
E. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Senjata Api	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Populasi Dan Sampel	46
E. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Prosedur Perizinan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api.....	47
1. Pengertian Senjata Api	47
2. Prosedur Perizinan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Kepolisian	48
B. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian.....	50
1. Kepemilikan Senjata Api	50
2. Penyalahgunaan Senjata Api	51
3. Faktor Internal	55
4. Faktor Eksternal	60
BAB V P E N U T U P	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Andi Anugrah Yudha Putra

NIM : 10500109012

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : “ Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri (Tinjauan Kriminologis) ”

Skripsi ini adalah studi tentang Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Aparat Polri (Tinjauan Kriminologis). Pokok permasalahan utama adalah bagaimana prosedur kepemilikan senjata api bagi aparat Kepolisian dan mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api oleh aparat Polri.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan khususnya perundang-undangan dan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan Kepolisian. Sedangkan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi objek penelitian untuk mengadakan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku karya ilmiah, artikel-artikel dari koran dan data-data lainnya yang diperoleh melalui situs internet, kemudian data-data itu diolah secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa :

1. Penyalahgunaan senjata Api oleh aparat Polri dilakukan melalui wilayah Polrestabes Makassar.
2. Bahwa untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, harus melalui beberapa prosedur yaitu: Bagi seorang Polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala satuan kerja masing-masing unit yang kemudian diteruskan kepada bagian Logistik. Setelah itu ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari sipemohon. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dari bagian administrasi (Min) jangka waktu satu tahun. Jika masa waktu sudah habis maka diadakan tes lagi.

Dengan demikian disarankan hendaknya aparat Polri harus lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, baik pada lingkungan internal maupun eksternal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan masyarakat yang selalu membawa perkembangan dalam segala kebutuhannya, termasuk segala segi dan pengaturannya dalam kehidupan. Penemuan baru dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia, perubahan-perubahan ini selalu dengan timbulnya kepentingan-kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya memerlukan perlindungan terhadap gangguan-gangguan yang mungkin datang dari sesama manusia. Perlindungan ini oleh negara diberi dalam bentuk pengeluaran segala peraturan-peraturan hukum.

Dihadapkan dengan perkembangan yang demikian pesat, hukumpun berkembang kearah diferensiasi dan spesialisasi. Bidang-bidang hukum tertentu melepaskan diri dari induknya dan berdiri sendiri sebagaimana halnya ilmu hukum itu sendiri lepas dari induknya yaitu filsafat. Demikianlah suatu masyarakat yang modern menghendaki hukum, sementara itu timbul pula persoalan baru sebagai akibat dari diferensiasi dan spesialisasi, yaitu yang berupa penegakan hukum yang semakin bertambah sulit oleh karena memerlukan pula pemikiran tentang sistem kontrol yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Persoalan penegakan hukum menjadi tidak akan ada hentinya dibicarakan, apalagi kita selalu menyadari bahwa didalam masyarakat selalu terdapat dua kekuatan,

yaitu disatu pihak kekuatan yang mempersatukan dan dilain pihak kekuatan yang memecah akibatnya pertikaian akan selalu ada dan memungkinkan persoalan penegakan hukum atau masalah *Rule Of Law* dan *Law Enforcement* akan merupakan persoalan yang selalu up date oleh karena memang diperlukan demi langsung lestari masyarakat dan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh *Rosco Pound* bahwa¹:

Manusia, sebagai sejarah peradapan dewasa ini dan dahulupun hidup didalam kelompok-kelompok atau gabungan atau didalam hubungan yang menurut tabiatnya mengandung suatu "ketertiban dalam" (*inner-order*) yang jika tidak ada manusia tidak akan ada pula "ketertiban dalam" hal ini dipelihara oleh semacam kontrol social.

Di bagian lain dari bukunya, *Rosco Pound* memberikan pernyataan pula tentang bagaimana cara "ketertiban-dalam" itu di pertahankan, sebagai ternyata dalam kutipan dibawah ini²:

Tetapi karena tiap-tiap kelompok dan perkumpulan ini mempunyai "ketertiban dalam" sendiri yang dipelihara oleh beberapa bentuk kontrol sosial, maka masyarakat politik yang teraturpun mempunyai "ketertiban dalamnya", yang dijaga pejabat dan badan-badannya. Demikianlah di dalam tiap masyarakat yang berorganisasi politik terdapat apa yang kita namakan ketertiban hukum suatu bentuk yang sangat khas dari kontrol sosial.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machstaat*) maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum.

¹Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)* (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h. 10

²Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)* (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h. 11

Adanya dukungan kewibawaan itu lebih terlihat urgensinya apabila kita hubungkan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".³

Dengan mengingat bahwa pejabat adalah orang-orang pribadi, dan hukum yang dapat diterapkan kepada mereka adalah hukum yang boleh diterapkan kepada tiap orang lainya.

Jadi dengan adanya hukum yang mengatur secara khusus tentang tugas, organisasi, status dan wewenang dari badan-badan penegak hukum tadi maka tindakan-tindakan mereka didalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan, sedangkan tindakan yang diatur yang melampaui batas wewenang hukumnya atau memang mereka tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Negara Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tujuan yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia alinea ke IV (empat) yaitu:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka

³Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 44

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁴

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibagi dalam bermacam-macam fungsi pemerintahan negara dimaksudkan agar ada pembagian tugas yang jelas antara lembaga yang satu dengan yang lainnya, sehingga mudah untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dari masing-masing lembaga negara tersebut. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang. Termasuk tugas dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kemajuan masyarakat tersebut maka timbul perubahan tuntutan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Tuntutan perlindungan ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 (satu) undang-undang tersebut yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), h. 4

ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekarang ini yang menjadi sorotan tajam masyarakat Indonesia sekarang ini adalah berkisar pada persoalan tindakan-tindakan badan-badan pemerintah yang melampaui batas wewenang hukumnya. Sudah termasuk di dalamnya sorotan terhadap tindakan-tindakan dari pada badan-badan penegak hukum terutama polisi. Disini polisi sebagai penegak hukum merasa apa yang mereka lakukan adalah benar. Mereka mengira bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sebagai bentuk tindakan penegakan hukum (perbaikan di muka bumi). mereka mengklaim bahwa merekalah orang-orang yg melakukan perbaikan, tapi nyatanya merekalah yg berbuat kerusakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:11:

مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا الْأَرْضُ فِي تَفْسِدُوا لَا لَهُمْ قِيلَ . . . وَإِذَا

Terjemahnya :

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi" mereka menjawab: "sesungguhnya kami orang-orang yg mengadakan perbaikan".⁵

Selanjutnya dalam Q.S Al-Baqarah/2:12:

يَشْعُرُونَ لَا وَلَكِنَّ الْمُفْسِدُونَ هُمْ إِنَّهُمْ أَلَّا . . .

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), h. 4.

Terjemahnya :

“Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.”⁶

Fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dari masa ke masa menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, mulai dari praktisi hukum maupun akademisi bahkan masyarakat kebanyakan dan pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peran kepolisian tersebut. Upaya pengupasan kepolisian itu dikarenakan adanya faktor-faktor dari berbagai pihak kepada Lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Juga tidak bisa berhenti sampai disitu, atensi itu termasuk juga merubah struktur Kepolisian secara kelembagaan, dimana organisasi kepolisian mulai dari bawah institusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik.

Polisi Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya terhadap masyarakat yaitu dalam bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam praktek dilapangan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1996), h. 4.

Diusianya yang sudah dewasa, Polri seharusnya sudah menanggalkan citranya sebagai institusi konvensional. Watak-watak primitif institusi polisi yang identik dengan (orde baru) masih juga muncul. Profesionalisme kepolisian masih belum teruji dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan penjaga keamanan. Padahal pasca reformasi sektor keamanan-pertahanan, masyarakat sangat berharap institusi ini bisa mengambil peran penting dan strategis yang sesungguhnya.

Pemisahan TNI - Polri yang telah berlangsung pada usia muda reformasi, ternyata tidak ikut dengan kesiapan mental di dua institusi ini untuk saling menghargai dan menghormati posisi masing-masing. Perseteruan terbuka dalam konteks politik pada rencana legislasi Undang-Undang. Secara institusional, profesionalitas kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntabilitas dan transparansi ditubuh institusi kepolisian.

Dewasa ini sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ditubuh institusi Kepolisian khususnya pelanggaran dalam bidang penyalahgunaan senjata api. Keadaan ini sangat disesalkan dimana bahwa penyalahgunaan senjata api dewasa ini, dilakukan oleh aparat Polri itu sendiri yang seharusnya melindungi masyarakat. Hal ini membuktikan semakin buruknya citra Polisi di tengah-tengah masyarakat.

Kepemilikan senjata api selain untuk melaksanakan tugas pokok pengamanan bagi anggota TNI dan POLRI, bagi kalangan sipil senjata api diperuntukkan untuk membela diri. Namun, perlu kita ketahui, selain peredaran

senjata api legal, ternyata peredaran senjata api ilegal juga semakin meresahkan masyarakat. Bahkan kecemasan dari masyarakat terkait penyalahgunaan senjata api semakin meningkat setiap hari. Masih baru-baru ini, tanyangan berita Indonesia menyoroti aksi anggota kepolisian yang mengacungkan pistol kepada karyawan sebuah bar di Sulawesi Utara serta aksi “kobo” yang dilakukan oleh Iswahyudi yang mencoba menakut-nakuti karyawan sebuah restaurant di daerah Jakarta Selatan. Selain kasus-kasus di atas, kasus-kasus pembunuhan yang menjadi sorotan publik hampir semuanya terkait dengan penyalahgunaan senjata api⁷.

Kasus lain terjadi di Makassar, seorang anggota kepolisian menembak atasannya karena salah paham. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, Kombes Pol Purwadi ditembak sebanyak empat kali dibagian tubuhnya oleh anggota Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpam Obvit) Polrestabes Makassar Briptu Ishak. "Penembakan terjadi karena adanya kesalahpahaman sehingga anggota datang dua kali sambil membawa senjata api," jelas Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Brigjen Pol Syahrul Mamma di Makassar, Sabtu (6/4/2013). Ia mengatakan, penembakan yang dilakukan anggota Ditpam Obvit Polrestabes Makassar itu karena pelaku tidak menerima adanya perluasan pembangunan yang dilakukan pengelola RS Bhayangkara. Sebelumnya, informasi yang diterima, pelaku saat ini tinggal di lokasi rencana perluasan tersebut.

⁷<http://hukum.kompasiana.com> (Diakses 5 Februari 2013)

Pelaku yang berusaha meminta penjelasan kepada kepala rumah sakit siang tadi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan sehingga pelaku datang kembali ke rumah sakit. Kedatangan pelaku untuk kedua kalinya membawa senjata api jenis *revolver* dan langsung menendang pintu kemudian menembak sebanyak empat kali. "Pelaku yang sudah datang kedua kalinya itu langsung menembak saat berada di depan pintu ruangan korban dan menembak sebanyak empat kali. Tiga tembakan mengenai tubuh korban," katanya. Tembakan pertama pelaku mengarah ke pintu dan tembakan kedua menembus dada bagian kiri korban kemudian disusul dengan tembakan ketiga dan keempat yang mengenai paha kiri serta selangkangan korban. Seusai penembakan itu, pelaku kemudian menyerahkan diri dan langsung digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara korban langsung mendapat perawatan⁸.

Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan apabila keadaan nyawa si pemegang dalam keadaan bahaya, namun keseringan bukan nyawa si pemeganglah yang terancam, tetapi si pemeganglah yang mengancam nyawa orang. Selain itu juga sering kita temukan bahwa si pemegang senjata dengan sengaja memamerkan senjatanya dengan tujuan mengintimidasi orang lain. Sebenarnya semua perbuatan yang telah disebutkan di atas merupakan suatu tindak pidana⁹.

⁸<http://www.thecrowdvoice.com/post/polisi-tembak-atasan-karena-salah-paham-9327133.html> (Diakses 23 Juli 2013)

⁹<http://hukum.kompasiana.com> (Diakses 5 Februari 2013)

Aparat Polri yang selama ini dikagumi oleh masyarakat kini tercoreng citranya ditengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena ulah atau perbuatan dari aparat Polri itu sendiri yang mencoreng nama baiknya sebagai kesatuan aparat yang berseragam coklat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka ditariklah beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk dibahas lebih dalam. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi aparat Kepolisian ?
2. Mengapa terjadi penyalahgunaan senjata api oleh aparat Polri ?

C. Pengertian Operasional

Untuk mmenghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penyusun skripsi ini menjelaskan beberapa istilah, sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan¹⁰.

2. Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala kemasyarakatan¹¹. Sedangkan Tinjauan Kriminologi berarti mengkaji konsep kejahatan yang menyangkut faktor penyebab serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman.
3. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yg diperolehnya adalah hasil – jabatannya¹².
4. Senjata adalah alat yang dipakai untuk berperang. Sedangkan senjata api adalah senjata yg menggunakan mesiu (senapan, pistol, dsb)¹³;
5. Aparat Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁴.

D. Tinjauan Pustaka

¹⁰<http://drummerfan.wordpress.com/2010/03/25/perbedaan-mekanisme-proses-tinjauan-analisis-dan-evaluasi> (Diakses 30 Oktober 2013)

¹¹Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum (Internasional & Indonesia)* (Jakarta: Wipress, 2007), h. 266

¹²<http://artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html> (Diakses 30 Oktober 2013)

¹³<http://www.kamusbesar.com/57549/senjata-api>, sumber KBBI (Diakses 30 Oktober 2013)

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 (2)

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan *Cesare Lombroso* (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan *Enrico Ferri* sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan para penjahat baru dalam masyarakat.

Kriminologi yang memandang bahwa negara (kekuasaan) adalah penyebab dari kejahatan dan seharusnya bertanggung jawab atas merebaknya kejahatan dalam masyarakat yang dikenal sebagai aliran kriminologi kritis, dipelopori oleh *Taylor* dan *Joek Young*, kriminolog Inggris. Aliran ini menyebar luas ke Amerika Serikat dan melahirkan aliran *New Criminology* (Kriminologi Baru).beberapa studi tentang kejahatan dan aliran klasik (abad XVIII), aliran positif dan aliran sosiologis (abad XIX), dan aliran perlindungan sosial (*Social defence*) abad XX, merupakan perkembangan studi kejahatan yang berkisar kepada peranan hubungan individu dan masyarakat, terlepas dari peranan hubungan antara negara dan masyarakatnya¹⁵.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁵Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi* (Surabaya: PT. Refika Ad, 1992), h. 44

a. Tujuan penelitian

Dan yang menjadi tujuan dari penelitian, pembahasan serta penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Kepolisian.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyalahgunaan senjata api bagi aparat Kepolisian.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dimaksudkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kepolisian dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api, dan pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan senjata api.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dimaksudkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang faktor terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penulisan ini, juga diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan khususnya aparat kepolisian sehingga dapat bermanfaat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam tubuh aparat Kepolisian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan, sedangkan tinjauan kriminologi berarti mengkaji konsep kejahatan yang menyangkut faktor penyebab serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk didalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman¹. Nama kriminologi itu sendiri pertama kali ditemukan oleh *P. Topinard* (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi itu terdiri dari dua suku kata yakni “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti Ilmu Pengetahuan, maka kriminologi itu berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat².

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut :

¹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 2

²Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9

Edwin H. Sutherland Cressey memberikan batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai berikut³:

Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (*political society*) didefinisikan sebagai kejahatan. Kendati ada batasan tindakan tersebut, terdapat orang-orang yang terus-menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan. Politisi memberi reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi.

Berdasarkan pada definisi diatas, *Sutherland* dan *Cressey*, menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu⁴ :

1. Sosiologi hukum,
2. Etiologi kriminal
3. Penologi (termasuk metode pengendalian sosial)

W.A Bonger memberikan batasan bahwa : “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya”⁵.

Dalam memberikan batasan kriminologi, membagi kriminologi ke dalam dua aspek, yaitu :

1. Kriminologi praktis, yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya.

³Edwin H. Sutherland, *Kriminologi* (New York: J.B Lippicoot Company, 1970), h. 1

⁴Edwin H. Sutherland, *Kriminologi* (New York: J.B Lippicoot Company, 1970), h. 2

⁵Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9

2. Kriminologi teoritis, yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi. Dalam kriminologi teoritis, *Bonger* memperluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan, antara lain :
 - a. Atropologi kriminologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
 - b. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi social).
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
 - d. Psi-patologi-kriminal dan neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
 - e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.
 - f. Kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan.
 - g. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.

Bonger dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan lebih menggunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Menurut J. Constant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”⁶.

⁶A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 14

Sedangkan WME. Noach “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya”⁷.

Selanjutnya Muhammad Mustofa dalam bukunya, menyatakan bahwa :

Definisi kriminologi yang dikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis, kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang:

- a. Perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan
- b. Pola-pola tingkah laku dan sebab musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat.
- c. Pola reaksi sosial formal, informasi, dan non-formal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia, serta usaha negara dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia dalam kesejahteraan sosial.

BONGER memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, *Bonger* lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

⁷A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 14

2. Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminil

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman⁸.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

Edwin H. Sutherland Cressey, memberi batasan kriminologi sebagai bagian dari sosiologis dengan menyebutkan sebagai berikut⁹ :

Kumpulan pengetahuan yang meliputi delinkuensi dan kejahatan sebagai gejala sosial. Tercakup dalam ruang lingkup ini adalah proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Proses tersebut terdiri dari tiga aspek yang merupakan suatu kesatuan interaksi yang berkesinambungan. Tindakan-tindakan tertentu yang dipandang tidak disukai oleh para politisi (*political society*) didefinisikan sebagai kejahatan. Kendati ada batasan tindakan tersebut, terdapat orang-

⁸Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 9

⁹Edwin H. Sutherland Cressey, *Kriminologi* (New York: J.B Lippincott Company, 1970), h. 1

orang yang terus-menerus melanggarnya dan dengan demikian melakukan kejahatan. Politisi memberikan reaksi berupa penghukuman, pembinaan, atau pencegahan. Urutan interaksi inilah yang merupakan pokok masalah dalam kriminologi.

Berdasarkan pada defenisi diatas, *Sutherland* menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu¹⁰ :

1. Sosiologi hukum
2. Etiologi Kejahatan
3. Penology

W.A Bonger memberikan batasan bahwa :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”¹¹.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian Polri, terlebih dahulu dikemukakan pengertian polisi. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, *Politea* yang berarti pemerintahan negara Yunani terdiri kota-kota yang disebut dengan “*polis*”, pada waktu itu pengertian polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan. Pengertian polisi tersebut pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini. Dari istilah *politea*

¹⁰Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.11

¹¹Mustofa Muhammad, *Kriminologi* (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 20

dan *polis* kemudian timbul istilah *lapoli*, *police* (Inggris), *polzei* (Jerman), dan *polisi* (Indonesia).

Charles Reith dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye Of History*, mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris: *Police Indonesia the English Language came to mean of planning for improving ordering communal existence* , yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat¹². Pengertian ini berpangkal dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mamatuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian timbul Polisi, baik orangnya maupun tugasnya adalah untuk memperbaiki dan menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut¹³.

Pada abad ke 14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politea*, maka dengan istilah *politea* atau polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja.

¹²Utomo Hadi Warsito.H, *Hukum Kepolisian Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Jakarta, 2005), h. 34

¹³Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta Manunggal, 1997), h. 18

Dari arti kata polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan dibidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering bercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi adalah¹⁴ :

1. Polisi sebagai fungsi
2. Polisi sebagai organ Kenegaraan dan,
3. Polisi Sebagai Pejabat atau Petugas.

Polisi yang disebut sehari-hari dalam arti petugas atau pejabat. Karena merekalah yang kesehariannya berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keselamatan dan ketentraman kelompoknya. Namun dalam bentuk polisi atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah rakyat minta perlindungan, dapat mengadukan keluhannya dan seterusnya dengan diberi atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewenangan menegakan aturan dan melindungi masyarakat.

Perbedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang terus, sehingga dikemudian hari melahirkan banyak variasi. Setiap negara memberikan atribut yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut itu secara fisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau

¹⁴Kunarto, *Binteman Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), h. 20

simbol-simbol yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan memberikan atribut yang berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.

Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka pengertian polisipun mengalami perkembangan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dijelaskan pengertian kepolisian secara limitatif yaitu : Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁵. Walaupun mengalami perkembangan mengenai pengertian kepolisian, namun ide dasar keberadaan polisi tidak berubah yaitu mengenai urusan pemeliharaan pemerintahan.

3. Senjata Api

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2002, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 (1)

menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan¹⁶.

Senjata Api juga dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian¹⁷.

Lebih lanjut dijabarkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan :

Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

¹⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api (Diakses 27 Juli 2013)

¹⁷Kunarto, *Binteman Polri* (Jakarta: Cipta Manunggal, 2001), h. 25

Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukkan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Intruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh dijelaskan dalam ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, yang juga senjata api adalah :

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya

Dengan demikian, yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagian daripadanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api¹⁸.

B. Jenis – Jenis Krimonologi

1. Body Types

a. ERNST KRETCHMER (1888-1964)

Kretschmer melakukan studi terhadap 260 orang gila di Swabia, sebuah kota di baratdaya Jerman. Dia mendapati fakta bahwa subyek studinya memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang berkaitan, menurutnya, dengan tipe tertentu dari kecenderungan fisik.

Kretschmer mengidentifikasi empat tipe fisik : (1) *asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil; (2) *athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar; (3) *pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas; (4) beberapa tipe campuran, tidak terklasifikasi. *Kretschmer* selanjutnya menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakteraturan fisik: *pyknic* berhubungan dengan depresi, *asthenic* dan *athletic* dengan *schizophrenia*, dan sebagainya¹⁹.

¹⁸[http:// www.bumn.go.id / pindad / id / galeri / artikel / the-definition-and-regulations-of-weapons /](http://www.bumn.go.id/pindad/id/galeri/artikel/the-definition-and-regulations-of-weapons/) (Diakses 27 Juli 2013)

¹⁹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 43

b. ERNEST A. HOOTEN (1887-1954)

Setelah tantangan *Goring*, teori *Lombroso* kehilangan popularitas akademik sampai sekitar seperempat abad. Hingga pada tahun 1939 *Ernest Hooten*, seorang Antropologi fisik, membangun kembali perhatian terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan dengan publikasinya tentang suatu studi besar yang membandingkan penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group dan non-kriminal.

Hooten memulai dengan kritik tajam terhadap penelitian *Goring* dari segi metode, dan dia meneliti dengan analisa mendetail data-data lebih dari 17.000 kriminal dan non-kriminal. Dia menyatakan bahwa para penjahat berbeda secara inferior dibanding anggota masyarakat lainnya dalam hampir semua ukuran tubuh/fisik mereka. Selanjutnya *Hooten* menyimpulkan bahwa:

“in every population there are hereditary inferiors in mind and in body as well as phsycal and mental deficientes... our information definitely proves that it is from the physically inferior element of the population that native born criminals from natiive parentage are mainly derived”

Sebagaimana pendahulunya, *Hooten* menyerukan pemisahan (penyingkiran) terhadap apa yang dia sebut sebagai “*criminal stock*” atau keturunan kriminal, dan dia merekomendasikan untuk mensterilkan atau membersihkan mereka.

c. **WILLIAM H. SHELDON (1898-1977)**

Diamping membawa pendapat *Kretschmer* ke Amerika Serikat, *William H. Sheldon* memformulasikan sendiri kelompok somatotypes: (1) *the endomorph* (memiliki tubuh gemuk); (2) *the mesomorph* (berotot dan bertubuh atletis); dan (3) *the ectomorph* (tinggi, kurus, fisik yang rapuh). Setiap tipe tadi mempunyai temperamen yang berbeda. Menurut *Sheldon*: “*Solid flesh and bone of the individual*” (daging padat dan tulang seorang individu) merupakan “basis for the study” (dasar untuk melakukan kajian) yang memberikan suatu *frame of reference*. Menurutnya pula, ada : *high correlation between physique and tempramet*”, tetapi “*not one to one relationship*”.

Menurut *Sheldon*, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph (secara fisik kuat, agresif, dan atletis) cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal²⁰.

Dalam studinya, *William Sheldon* meneliti 200 pria berusia antara 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan temperamen, kecerdasan, dan *delinquency*. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, *Sheldon* menghasilkan suatu “*Index to Deliqueny*” yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat²¹.

²⁰Alam A.S., *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010), h. 19

²¹Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 44-45

2. Biologis

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosiologi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi *Cesare Lombroso*, *Rafaelle Garofalo* serta *Charles Goring* dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Auguste Comte (1798-1857), sosiolog Perancis, membawa pengaruh penting bagi tokoh-tokoh mazhab positif (termasuk mazhab Biologi). Menurutny: “*There could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach*”. Mazhab biologi juga mendapat pengaruh dari Charles Darwin (1809-1882), penulis buku *Origin of Species* (1859) yang menyatakan bahwa: “*...all had evolved through a process of*

adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence.” Teori evolusi Darwin yang menantang pendapat lama serta positifisme Comte mempengaruhi pendekatan Biologis.

Meskipun tokoh paling terkenal dari pendekatan ini adalah Lombroso, namun sebenarnya ia dapat ditelusuri hingga abad ke-16 yaitu ketika Giambattista della Porta (1535-1615) menemukan *physiognomy*, studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha Porta dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater (1741-1801). Usaha Porta dan Lavater itu kemudian dielaborasi oleh Frans Joseph Gall (1758-1828) dan Johann Kaspar Spurzheim (1776-1832). Tokoh dari *Prenology* tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis.

Jadi, sebelum abad ke-19, ilmu pengetahuan *physiognomy* dan *prenology* telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu kedalam studi tentang sebab-musabab kejahatan²².

3. Psikologis

a. *Personality characteristics* (sifat-sifat kepribadian)

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-

²²Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 36-37

perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat; dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan²³.

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), *Yochelson* (seorang psikiater) dan *Samenow* (seorang psikolog) menolak klaim para Psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berfikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

Yochelson dan *Samenow* mengidentifikasi sebanyak 52 pola berfikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan²⁴.

²³Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49

²⁴Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 49

c. *Mental Disorder*

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe *mental disorder* (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis bernama *Philippe Pinel* sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris bernama *James C. Prichard* sebagai “*moral insanity*”, dan oleh *Gina Lombroso-Ferrero* sebagai “*irresistible atavistic impulses*”.

Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality*--suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. Psikiater *Harvey Cleckley* memandang *Psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus; tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan²⁵.

²⁵Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50

d. Personality Traits/Inherited Criminality (Dugdale Dan Goddard)

Pencarian/penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad ke-19. Ia menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah *The Jukes* diterbitkan (Dugdale, 1877). Buku ini menggambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita karena “*degeneracy and innate depravity*” (kemerosotan dan keburukan bawaan).

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya *Dugdale* (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga yang disebutnya *Jukes*. Ketertarikannya pada keluarga itu dimulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari *Ada Jukes*, yang dia sebut sebagai “*mother of criminal*”, Dugdale mendapati diantara seribuan anggota keluarga itu 280 orang fakir/miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyakit kelamin, dan 50 orang pelacur.

Temuan *Dugdale* di atas mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Kesimpulan yang serupa diperoleh *Henry Goddard* (1866-1957). Dalam studinya tentang keluarga besar *Martin Kallikak*, *Goddard* menemukan lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah *Kallikak* dibanding keturunan dari anaknya yang lain hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkualitas sama dengannya.

4. Tipe Kriminologi Modern

Kriminologi sebagai bidang studi tentang kejahatan dapat ditelusuri melalui sejarah panjang dari buku-buku teks yang terbit di Eropa dan Amerika beberapa waktu yang lampau, khususnya yang berisi teori-teori tentang kejahatan. Sebagai studi ilmiah tentang kejahatan, kriminologi tumbuh dan berkembang sebagai reaksi dari “kekacauan” dan ketidak tertiban di Negara-negara Eropa abad 18 dan 19 dengan harapan bahawa ilmu pengetahuan baru dapat menemukan hukum alam yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Akibatnya segala sesuatu yang dipandang sebagai dapat mengganggu terwujudnya kesejahteraan masyarakat seperti kejahatan, dipandang sebagai melanggar hukum alam.

Penjelasan demonologik mendasarkan pada adanya kekuasaan lain atau spirit. Unsur utama dalam penjelasan spirtistik adalah sifatnya yang melampaui

dunia empirik, dia tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan atau fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subyek kontrol atau pengetahuan dari pikiran manusia yang bersifat terbatas. Oleh karena spirit (roh) itu sendiri tidak dapat dijelaskan dan tidak dapat dimengerti, sehingga ini merupakan cara penjelasan yang sempurna bagi semua fenomena.

Pada penjelasan naturalistik, penjelasan yang di berikan lebih terperinci dan bersifat khusus serta melihatnya dari segi obyek dan kejadian-kejadian dunia kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan demonologik menguraikan dasar kekuatan dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan naturalistik menggunakan ide-ide dan penafsiran terhadap obyek dan kejadian-kejadian serta hubungannya dengan dunia yang ada. Dengan demikian penjelasannya berada pada apa yang diketahui atau dianggap benar menurut fakta fisik atau empirik dan dunia kebendaan. Pendekatan naturalistik inipun dikenal baik pada kuno maupun modern²⁶.

1. Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Intelegensi membuat manusia mampu mengarahkan dirinya sendiri dalam arti dia adalah penguasa dari nasibnya, pemimpin dari jiwanya, makhluk yang mampu memahami dirinya dan bertindak untuk mencapai kepentingan dan kehendaknya.

²⁶ <http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kriminologi.html> (Diakses 24 Oktober 2013)

Ini merupakan kerangka pemikiran dari semua pemikiran klasik seperti dalam filsafat, psikologi, politik, hukum dan ekonomi. Dalam konsep yang demikian maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia mampu mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat.

Kejahatan di pandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal itu adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus di bayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini tugas kriminolog adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan. Dalam literatur kriminologi, pemikiran klasik (neo klasik) maupun positive merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. Nama yang sangat terkenal adalah *Cesare Beccaria* (1738-1794).

2. Kriminologi Positive

Aliran pemikiran positive bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik berupa faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi

mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya atau evolusi kulturalnya²⁷.

Aliran pemikiran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda yaitu determinis biologik yang menganggap bahwa organisasi sosial berkembang sebagai hasil dari individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologik. Sebaliknya determinis kultural menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan nilai-nilai dunia sosio cultural yang melingkupinya²⁸. Mereka berpendapat bahwa dunia kultural secara relatif tidak tergantung pada biologik, dalam arti perubahan pada yang satu tidak berarti sesuai atau segera menghasilkan perubahan lainnya. Perubahan kultural diterima sebagai suatu dengan bekerja ciri-ciri istimewa atau khusus dari fenomena kultural daripada sebagai akibat dari keterbatasan biologik semata. Dengan demikian biologi bukan penghasil kultur, begitu juga penjelasan biologik tidak mendasari fenomena kultural.

Cesare Lombroso (1835-1909) dapat dipandang sebagai pelopor aliran ini yang memulai studinya dengan mencari sebab-sebab kejahatan yang lebih menekankan pada sifat dasar perilaku kejahatan daripada ciri-ciri perbuatan jahat. Disamping itu aliran positive dipandang sebagai yang pertama kali dalam bidang kriminologi yang memformulasikan dan menggunakan cara pandang, metodologi dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan manusia.

²⁷<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kriminologi.html> (Diakses 24 Oktober 2013)

²⁸Soekanto Soerdjono, *Suatu Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 45

Sebagai pelopor mazhab positive, *Lombrosso* lebih dikenal dengan teori biologi kriminal, namun perlu di catat bahwa itu bukan merupakan dasar dari aliran positive. Dasar sesungguhnya dari postivisme dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*multiple factor causation*), yakni faktor-faktor yang alami atau yang di bawa manusia dan dunianya, yang sebagian bersifat biologik dan sebagian karena pengaruh lingkungan²⁹.

3. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, artinya manakala masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat di identifikasikan dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial, sebab dia ada hanya karena hal itu dinyatakan oleh masyarakat. Oleh karenanya kriminologi kritis mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi kritis bukan sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan. Dekatan kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan “interaksionis” dan “konflik”. Pendekatan interkasionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan

²⁹<http://gudangilmuhukum.blogspot.com/2010/08/kriminologi.html> (Diakses 24 Oktober 2013)

dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal oleh masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki oleh agen kontrol sosial dan orang-orang yang diberi batasan sebagai penjahat. Di samping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat³⁰.

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dinyatakan dengan digunakannya konsep “penyimpangan” (*deviance*) dan rekasi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan-tindakan yang dipandang sebagai tindakan-tindakan normal atau biasa di dalam masyarakat dan terhadap tindakan menyimpang tersebut diberikan reaksi sosial yang negatif, dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai “berbeda” dan “jahat”. Dengan demikian siapa yang dipandang menyimpang dari masyarakat tertentu terutama tergantung pada masyarakat itu sendiri.

Dasar pemikiran interkasionis ini bersumber pada “*symbolic interactionism*” yang dikemukakan oleh Mead (1863-1931) yang menekankan bahwa “sumber” perilaku manusia, tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial, akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan, dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peran individu dalam menangani, menafsirkan, dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang

³⁰Soekanto Soerdjono, *Suatu Pengantar Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.

bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya.

C. Kode Etik Kepolisian

Kode Etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Bab II Peraturan Kapolri menerangkan mengenai Etika Profesi Polri yaitu :

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KEPP mencakup:

- a. Etika Kenegaraan;
- b. Etika Kelembagaan;
- c. Etika Kemasyarakatan; dan
- d. Etika Kepribadian.

Bagian Kedua
Materi Muatan KEPP
Pasal 5

Pengaturan KEPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi³¹:

a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pancasila;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. dan Kebhinekatunggalikaan.

b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. Tribrata sebagai pedoman hidup;
2. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
3. Sumpah/janji Anggota Polri;
4. Sumpah/janji jabatan; dan
5. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir (mindset).

³¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4 & 5

c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
2. Penegakan hukum;
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat; dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan, dan toleransi.

d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:

1. Kehidupan beragama;
2. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum; dan
3. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Ketentuan Perundang-undangan Tentang Senjata Api

Indonesia memiliki 2 (dua) buah Undang-undang yang walaupun sudah berusia “lanjut” namun tetap berlaku secara efektif, salah satunya yaitu Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api (Undang-undang Senjata Api)³².

³²Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)* (Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 1984), h.102

Undang-undang ini merupakan satu-satunya Undang-undang yang masih efektif diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan Senjata Api.

Dalam Undang-undang tersebut, secara tegas diatur unsur-unsur dari tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia, sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Senjata Api yang menyatakan :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Sesuai ketentuan tersebut di atas, pelaku tindak pidana penyalahgunaan Senjata Api dapat dipastikan akan dihadapkan dengan ancaman sanksi/hukuman secara berjenjang sebagai berikut :

“ Hukuman Mati ; atau Hukuman penjara seumur hidup ; atau Hukuman penjara max 20 (dua puluh) tahun.”

Jika dilihat dari ancaman sanksi “minimal” dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas yaitu penjara maksimal 20 tahun, selayaknya kita tidak menganggap remeh untuk pemberlakuan Undang-undang Senjata Api ini.

Kiranya apa yang telah Penulis uraikan di atas terkait dengan Senjata Api, dapat bermanfaat bagi kita semua, dan agar tidak terjadi penyalahgunaan Senjata Api dikemudian hari³³.

³³[http:// www.bumn.go.id / pindad / id / galeri / artikel / the-definition-and-regulations-of-weapons /](http://www.bumn.go.id/pindad/id/galeri/artikel/the-definition-and-regulations-of-weapons/) (Diakses 13 oktober 2013)

E. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Senjata Api

Upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengizinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api³⁴.

³⁴<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2461> (Diakses 22 Oktober 2013)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar atau Polrestabes Makassar. Tepatnya dibagian : Bidang Propam substansi bidang Provos, Reserse Kriminal satker I, Denma bagian senjata api, dan Logistik Polrestabes.

Penulis juga melakukan penelitian pada perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar dan Perpustakaan Wilayah Makassar, karena penulis menganggap bahwa perpustakaan tersebut memiliki buku-buku referensi yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau dari hasil kepustakaan antara lain buku, dokumen, artikel, serta literature lainnya yang berhubungan dengan senjata api. Data sekunder ini kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bahan hukum, yakni:

- a. Menurut S. Nasution Data Primer adalah merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. yang dilakukan

dengan cara wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, dalam hal ini Polisi dan Masyarakat.

b. Data Sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literature-literatur, terdiri dari :

- Peraturan Perundang-undangan
- Buku-buku tentang hukum pidana
- Majalah atau artikel ilmiah
- *Website* atau situs yang membahas tentang senjata api¹

C. Teknik Pengumpulan Data

1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yakni buku-buku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita yang penulis peroleh dari media elektronik².

2. *Field research* (penelitian lapangan)

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Polrestabes Makassar dengan cara melakukan wawancara.

¹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 56

²http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_iii/07130097-hendra-kurniawan.pdf (Diakses 5 Februari 2013)

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, dalam penelitian ini adalah seluruh petugas Kepolisian Resort Kota Besar Makassar atau Polrestabes Makassar Dalam Memberikan Pembinaan bagi Oknum Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Senjata Api oleh pihak Kepolisian.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang dianggap mampu mewakili suatu populasi. Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu anggota Kepolisian atau pihak terkait yang berperan penting dan sedikit banyak telah menguasai atau mengetahui tentang senjata api dan orang yang terkait penyalahgunaan Senjata Api.

E. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data-data dan informasi, baik itu berupa data primer maupun data sekunder, kemudian penulis menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa Kualitatif, dimaksudkan untuk mendeskripsikan hasil temuan lapangan berdasarkan analisis kualitatif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PERIZINAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

1. Pengertian Senjata Api

Senjata Api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang, yang dapat dioperasikan, yang dirancang atau dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan bakar yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata “rakitan”, serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1976, Senjata Api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang Pertahanan dan keamanan. Sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor. 9 tahun 1976 yang menginstruksikan agar para menteri,pimpinan lembaga pemerintah maupun non pemerintah memiliki senjata api membantu pertahanan dan keamanan agar mencapai sasaran tugasnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Senjata Api diartikan sebagai segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya.

2. Prosedur Perizinan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Bagi Aparat Polri

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang Pertahanan dan keamanan. Bagi TNI hanya diperbolehkan menggunakan senjata api jika dalam tugas pengamanan negara misalnya dalam daerah-daerah rawan dan tidak diperbolehkan untuk dimiliki dalam kehidupan sehari-hari misalnya dibawa pulang kerumah. Bagi POLRI diperbolehkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api akan tetapi dalam hal ini tetap dalam prosedur sesuai dengan peraturan yang ada.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951, dan didukung dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1951 PRP Tentang Kewenangan Perijinan Senjata Api, dan disertai dengan surat Kapolri No. Pol. 82/II/2004 Tentang Petunjuk penggunaan Pengawasan Senjata Api.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini seorang Polisi memerlukan senjata api untuk mendukung tugasnya, akan tetapi

dalam hal ini tidak serta merta setelah menjadi seorang Polisi langsung mendapatkan dan memiliki senjata api serta dapat menggunakannya.

Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah :

- a. Dinas Efektif
- b. Lulus tes psikologi
- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat kepolisian, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Bagi seorang Polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada Kepala satuan kerja masing-masing unit.
2. Yang kemudian diteruskan kepada bagian logistik.
3. Setelah itu ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari sipemohon.
4. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dari bagian administrasi (Min) jangka waktu satu tahun.
5. Jika masa waktu sudah habis maka diadakan tes lagi.

Pada Polda Sulsel-Bar tes Psikologi diadakan secara berkala yaitu enam bulan sekali. Khusus bagi Reserse dan Intel diizinkan untuk membawa senjata kemana dan kapan saja karena sesuai dengan tugas mereka yang merupakan polisi rahasia yang dalam kesehariannya berpakaian preman. Namun bagi seorang Polisi diluar dari kesatuan Reserse dan Intel hanya diperbolehkan membawa senjata api dalam tugas, hal ini untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api. (Wawancara dengan Ipda Setya Budi, SH., bagian Renmin. Tanggal 28 November 2013)¹.

Mengenai struktur jabatan tidak ada pengaturannya secara khusus, karena Polisi sebagai pelaksana salah satu fungsi pemerintah membutuhkan senjata api untuk kepentingan tugasnya. Yang terpenting adalah lulus tes psikologi dan layak untuk memiliki dan menggunakan senjata api.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN

1. Kepemilikan Senjata Api

Memang Polisi diperlengkapi dengan senjat api, akan tetapi walaupun menjadi seorang Polisi tidak serta merta dapat memiliki senjata api dengan mudah, namun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana senjata api diberikan untuk kepentingan tugas. Meski POLRI telah memperketat kepemilikan dan penggunaan senjata api, namun belakangan dilakukan penarikan senjata api menyusul berbagai insiden yang terjadi dan dilakukan tes psikologi ulang bagi

¹Setya Budi, bagian Renmin di Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 28 November 2013

para pemegang senjata api. Jika ternyata terdapat ketidak layakan bagi seorang polisi dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata api maka terpaksa senjata api harus ditarik dan diamankan.

2. Penyalahgunaan Senjata Api

Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api akhir-akhir ini semakin marak, mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama Polisi sampai menembak diri sendiri. Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparat kini semakin meresahkan masyarakat, banyak yang khawatir atas kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Selama ini tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan senjata untuk aparat termasuk sanksi yang akan diberikan. Tetapi memang ada kebijakan dikesatuan masing-masing yang mengharuskan aparat keamanan untuk memegang senjata, tentunya bila ada penyalahgunaan senjata api itu sudah menjadi kewajiban dari pimpinan untuk menindakinya.

Munculnya berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api sesungguhnya sudah sering mencuat di tengah masyarakat, masyarakat merasa takut bila mendengar berbagai penyalahgunaan senjata api. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian maka POLRI perlu memperketat seleksi anggota sejak awal penerimaan dan juga dengan meningkatkan seleksi stabilitas mental dan pemantauan yang ketat ketika akan memberikan senjata kepada anggota tertentu.

Menurut Kapolri, para oknum yang melakukan penyalahgunaan senjata api tersebut dikenakan tindakan hukum disiplin dan pidana. Selain itu POLRI juga mengeluarkan kebijakan penggunaan senjata api bagi anggotanya untuk mencegah penyalahgunaan, diantaranya melakukan inventarisasi senjata api yang dipinjamkan kepada anggota, dan penarikan senjata api dari anggota yang dianggap tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan psikotes terhadap yang bersangkutan. Kemudian memperketat persyaratan pinjam pakai atau penggunaan senjata api kepada anggota melalui penerapan tes, tes tersebut meliputi aspek psikologi secara periodik, kepentingan tugas, kemampuan penggunaan senjata api, serta penilaian personil yang menyangkut kondisi dan mentalitas.

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Makassar. (wawancara dengan Kombes Pol. Drs. Syamsuddin Yunus, SH., tanggal 28 November 2013)²

1. Latar belakang

Peristiwa naas itu terjadi pada hari dan tanggal senin 4 Juli 2011 sekitar pukul 24.00 WITA atau antara pukul 21.00 WITA sampai pukul 23.00 WITA dikawasan kota Makassar, kecamatan Makassar, kelurahan Banta-bantaeng, jalan Veteran Selatan, tersangka (Briptu Syukur) melakukan penembakan terhadap korban yang bernama Asrullah. Terjadinya peristiwa penembakan tersebut diuraikan sebagai berikut.

²Syamsuddin Yunus, Kasi Propam di Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 28 November 2013

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan diatas tadi, peristiwa penembakan itu bermula saat lelaki yang memiliki seorang istri dan tiga anak (korban) menghunuskan senjata tajam (badik) untuk menakut-nakuti para kelompok pengendara motor yang siap-siap untuk menggelar balapan liar di jalan Veteran Selatan. Insiden itu dilakukan lantaran sebelumnya seorang keponakannya tewas tertabrak kendaraan yang terlibat aksi balapan liar. Seorang polisi yang melihat korban langsung memegang tangan kanan korban, ironisnya dia meronta dan melarikan diri. Tembakan peringatanpun dilayangkan ke udara, melihat hal itu seorang polisi lainnya kemudian mengejar menggunakan motor. Akibatnya korban terjatuh karena tersenggol, lalu kemudian keduanya terlibat perkelahian. Belakangan personel Kepolisian sektor Makassar, Briptu Syukur yang berusaha merampas badik dari tangan lelaki itu justru terkena sayatan dipaha sebelah kiri, lalu kemudian terdengar suara letusan dan Asrullah tergeletak bersimbah darah.

2. Motif

a. Korban

- 1) Seiring diadakannya aksi balapan liar oleh beberapa orang pemuda mendorong korban melakukan upaya sendiri yang menurutnya efektif untuk menghentikan aksi balapan liar.
- 2) Tewasnya keponakan korban yang diakibatkan oleh aksi balapan liar.

b. Tersangka

- 1) Melaksanakan tugas selaku aparat Kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
- 2) Melakukan upaya pembelaan diri akibat aksi berlebihan korban.

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api non tugas. Penyalahgunaan senjata api dalam tugas misalnya terhadap warga sipil karena salah sasaran pada saat mengejar penjahat, atau pada saat operasi latihan, sedangkan penyalahgunaan senjata api non tugas misalnya seperti:

- a. Bunuh diri
- b. Membunuh atau menembak orang lain (istri, anak, keluarga dan orang lain)
- c. Bermain-mainkan senjat api dengan cara menembakkan keudara yang dapat meresahkan masyarakat sekaligus dapat mencelakai masyarakat
- d. Menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti orang lain dengan maksud untuk dapat melakukan suatu aksi kejahatan menggunakan senjata api untuk kejahatan seperti mencuri, merampok. (Penjelasan Kombes Pol. Drs. Syamsuddin Yunus, SH., tanggal 28 November 2013)³

³Syamsuddin Yunus, Kasi Propam di Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 28 November 2013

3. Faktor Internal

a. Faktor Psikologi (Emosional)

Menurut pengamat Hukum I Wawan Titip Sulaksana, SH. dari Universitas Airlangga Surabaya, menyatakan selain tes psikologi untuk mengetahui kadar emosi polisi yang memegang pistol, otoritas kepolisian juga perlu melakukan tes fisik atas anggotanya yang memegang pistol dan membawa ke rumah. Polisi yang memegang pistol harus sehat secara psikis dan bugar secara fisik. Langkah berkelanjutan perlu dilakukan terkait penggunaan senjata oleh anggota polisi, caranya dengan melakukan tes psikologi dan fisik secara kontinyu setiap enam bulan sekali.

Sebagai yang tersurat pada hukum negara, Polisi kita mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan, tak ubahnya Polisi bagaikan seorang guru atau ulama. Ia memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan yang prima.

Sedang sebagai penegak hukum, polisi diuntut tegas, konsisten dalam tindakan, dan etis dalam sikap. Itulah jati diri Polisi, karena obyeknya adalah masyarakat, bangsa yang dihadapi, heterogen dan kompleks. Kearifan Polisi harus lebih dari sekedar kearifan seorang guru di sekolah. Kearifan seseorang sangat erat dengan kemampuannya mengendalikan emosinya, semakin tinggi kearifan seseorang akan semakin tinggi pula kemampuannya dalam mengendalikan emosi (stabilitas emosional). Polisi yang setiap hari dihadapkan pada tugas yang tak

menentu dan berhadapan langsung dengan masyarakat, sangat mutlak memiliki kestabilan emosi yang baik.

Menjadi Polisi perlu memiliki berbagai persyaratan dan kriteria. Kriteria Polisi yang baik mencakup tiga hal yaitu, memiliki kepribadian yang konsisten, tidak emosional, dan berpendidikan yang memadai.

Menurut pemikiran *Socrates* yang juga dikembangkan oleh *Jhon L. Suliva* menyimpulkan bahwa, untuk menjadi figur Polisi yang baik harus dilakukan lima hal yaitu⁴ :

1. Dilakukan seleksi yang baik agar masukan (input) Polisi adalah orang-orang yang benar terpilih.
2. Dilakukan pendidikan yang baik agar diperoleh polisi-polisi yang pintar dan berbudi luhur.
3. Dilatih dalam keseharian yang baik agar diperoleh polisi yang terampil, cekatan dan berpenampilan baik.
4. Diperlengkapi secara baik agar dapat bertindak cepat, tepat, tangguh, adil dan benar.
5. Digaji yang memadai agar diperoleh polisi yang sejahtera dan tidak mudah berbuat nyeleweng atau mempunyai sifat keberpihakan yang dapat mengusik rasa keadilan di masyarakat.

Untuk menciptakan polisi yang memiliki stabilitas emosional yang baik memang harus dipersiapkan dengan matang. Ini tentunya diawali dari penyaringan masuk menjadi calon Polisi (*well motivated*). Kemudian juga selama di didik dalam lembaga pendidikan dan juga faktor sosial yuridis ikut mempengaruhi emosional Polisi.

Berdasarkan fakta dilapangan, faktor yang paling dominan dalam penyalahgunaan senjata api adalah faktor emosi yang tidak stabil dari aparat

⁴Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta manunggal, 1997), h. 55

Polisi, sehingga sangat rentan terjadinya pelanggaran dalam hal penggunaan senjata api.

b. Faktor Seleksi dan *Rekrutment*

Rekrutment adalah satu pangkat kegiatan yang digunakan melegalisasi perolehan sejumlah orang yang mencukupi pada saat yang tepat dan memiliki orang yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi yang diambil adalah tenaga-tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti yang dirumuskan pada analisa jabatan dibidang keterampilan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman.

Seleksi adalah proses pengumpulan informasi untuk menentukan siapa yang dapat (memenuhi syarat) untuk dipekerjakan dibawah aturan resmi demi kepentingan organisasi Polri dan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Berbagai pertimbangan tindakan dalam *rekrutment*/seleksi penerimaan Polisi adalah⁵ :

1. Seleksi: menentukan pilihan atau cara menyeleksi
2. Format: cara mengajukan permohonan
3. Testing: memperoleh validitas diri pelamar, seberapa jauh pelamar dapat dipercaya/tahan uji
4. Wawancara
5. Pemeriksaan latar belakang dan pengecekan refrensi
6. Pengujian kesehatan
7. Pusat penilaian: sebagai pengambil keputusan terakhir

⁵Kunarto, *Etika Kepolisian* (Jakarta: Cipta manunggal, 1997), h. 22

Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam instansi POLRI dalam hal penerimaan atau *rekrutment* Polisi. Hal ini menyebabkan banyak calon pelamar yang diterima menjadi Polisi padahal sesungguhnya mereka tidak memenuhi semua persyaratan formal, keadaan seperti ini sungguh sangat ironis dan semakin memperburuk citra POLRI.

c. Faktor Ekonomi/Kesejahteraan POLRI

Mengingat keterbatasan anggaran operasional dan rendahnya gaji Polri, maka dukungan anggaran untuk operasional dan kesejahteraan anggota Polri dapat diperoleh dari dana *nonbudgeter* yang berasal dari sumbangan masyarakat (ditujukan pada institusi, bukan pada pribadi) dan penggunaannya dapat diatur dan dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai POLRI yang baik setidaknya memenuhi lima syarat yaitu: seleksi yang baik, pendidikan yang baik, pelatihan yang baik, dilengkapi dengan baik, dan kesejahteraan yang cukup.

Dinamika masyarakat yang berubah dengan cepat, diiringi dengan perubahan sosial, budaya dan teknologi, sementara disisi lain perkembangan tingkat kesejahteraan juga semakin kompleks, menuntut begitu tinggi peran Kepolisian untuk menghindari berbagai pelanggaran hukum yang terjadi.

Dengan demikian POLRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bukan lagi mengabdikan, dan bukan lagi berorientasi pada jabatan maupun loyalitas kepada pejabat tertentu secara individu. Polri dituntut untuk menjadi profesional yang mengacu pada ilmu pengetahuan dan berbasis kinerja dan produk-produk yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Faktor Kurang Profesional

Secara institusional, profesional kepolisian dapat dilihat dan sangat ditentukan dari beberapa indikator seperti: nilai dasar, sumber daya manusia, training, manajemen, konsep operasi, struktur, akuntabilitas, dan transparansi di tubuh institusi Kepolisian.

Untuk mencapai Polisi yang profesional dan yang efektif diperlukan Polisi yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan sehingga dapat menyesuaikan dengan corak masyarakat dan kebudayaan serta lingkungan yang dihadapinya. Kepolisian (*Policing*) adalah cara pelaksanaan tugas polisi yang mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Dalam rangka mencapai dan meningkatkan profesionalisme Polri diperlukan dasar atau landasan ilmu pengetahuan, salah satunya adalah ilmu kepolisian dalam rangka menghadapi tantangan dan upaya penyelesaiannya. Untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dalam menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan tentunya Polri dapat bertindak sebagai polisi yang netral, jujur, terbuka, bersih dan berwibawa, yang dicintai dan dihormati, dipercaya serta dibanggakan oleh masyarakatnya. Dalam mengimplementasikan Kepolisian Komuniti (*Community Policing*) dengan membangun kebudayaan organisasi Polri dalam birokrasi yang rasional.

4. Faktor Eksternal

- Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sangat dominan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dan untuk seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal ini terbukti bahwa lingkungan yang baik akan menghasilkan orang-orang yang baik pula. Lingkungan dalam hal ini bisa dilihat dari segi lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal atau lingkungan pergaulan, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan. Mengingat bahwa pekerjaan yang dilakukan seorang polisi sangat erat dengan penegakan hukum, hak asasi manusia, kebenaran dan keadilan, kesemuanya ini disebut dengan gejala sosial yang sangat menentukan seseorang untuk berbuat jahat dan untuk tidak berbuat jahat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Untuk mendapatkan izin penguasaan senjata api bukan untuk seterusnya tetapi dilakukan perpanjangan apabila memenuhi syarat. Penguasaan senjata api digunakan oleh aparat kepolisian yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang memerlukan penertiban beresiko. Dengan demikian syarat yang penting untuk dipenuhi adalah syarat tugas dan psikologi pemohon (Polisi).
2. Yang menjadi faktor-faktor penyalahgunaan senjata api berkaitan dengan kasus yang terjadi adalah adanya kelalaian pengguna (Polisi). Namun demikian faktor lain yang menentukan adalah profesionalisme sehingga penyalahgunaan timbul di luar wilayah hukum penggunaan dan izin penguasaan senjata api.

B. Saran

1. Dalam hal mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api hendaknya POLRI semakin memperketat dengan cara melakukan tes psikologi secara berkesinambungan.
2. Untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan senjata api, POLRI hendaknya benar-benar memperhatikan setiap syarat formal yang berlaku sehingga didapat Polisi yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 1992.
- Baker Thomas dan Carter L. David, *Police Deviance* (Penyimpangan Polisi), Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Karya Toha Putra, Semarang, 1996.
- Freidman, Robert. R. *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1988.
- Hamel Van dan Kanter E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta, 2002.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984.
- Kincey Richard dan Baldwin Robert, *Police Powers Politic (Kewenangan Polisi dan Politik)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2002.
- Kunarto, *Binteman Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- _____, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- _____, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta 2001.
- _____, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Prajogo, Soesilo. *Kamus Hukum (Internasional & Indonesia)*, Wipress, Jakarta, 2007.
- Satherland Edwin H. *Kriminologi*, J.B Lippicoot Company, New York, 1970.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sitompul DPM dan Edwarsyah, *Hukum Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2003.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, 1990.
- Tabah, Anton. *Menatap Dengan mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- _____. *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2003.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Bandung, 2010.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Jakarta, Jakarta, 2005.
- W.A. Bonger, *De Kleine Bonger (Pengantar Tentang Kriminologi)*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1995.
- PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- PP No. 3 Tentang Teknis Pelaksanaan Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan
Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R. Soesilo, Politea, Bogor.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Anugrah Yudha Putra, lahir di Makassar tanggal 28 Januari 1991 merupakan Anak ke enam dari delapan bersaudara pasangan H. Andi Baso dengan Hj. Andi Hasnah. Jenjang Pendidikannya Ditempuh mulai dari SD. Negeri Mandai pada Tahun 1996 – 2002 kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Makassar pada tahun 2002 – 2005, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 6 Makassar pada Tahun 2005 – 2008, hingga Pada tahun 2009 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada organisasi Esktra dan Intra yakni sebagai Kordinator Bidang Pengembangan Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum periode 2010 – 2011, Anggota Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS)